BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana seluruh tingkah laku orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat di atur oleh hukum dapat juga orang dengan badan hukum ataupun badan hukum dengan badan hukum yang berada di dalam suatu wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia memiliki sebuah batasan dan aturan yang telah diatur oleh hukum atau aturan Undang-Undang yang berlaku di wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, itu semua atas amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar aturan hukum yang tertulis di Negara Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, maka dari itu tingkah laku atau perbuatan manusia dengan manusia atau manusia dengan badan hukum haruslah diatur oleh Undang-Undang atau aturan hukum yang mengaturnya bertujuan agar tercapainya tujuan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga agar terwujud tujuan dari pancasila sebagai dasar falsafah berdirinya Negara Indonesia yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang masih tergolong kedalam negara berkembang dimana perekonomian Indonesia masih banyak memerlukan modal salah satunya yaitu di sektor pembangunan perekonomian nasionalnya, di dalam pembangunan perekonomian Indonesia masih memerlukan banyak sekali modal dari investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing yang berkenan menanamkan kelebihannya untuk meningkatkan pembangunan perekonomian Nasional Indonesia. Maka dari itu Indonesia harus lebih

memperhatikan tentang peraturan perundang-undangan yang ada di dalam pasar modal yang di gunakan untuk melakukan pengaturan-pengaturan di dalam pelaksanaannya dan juga di dalam perlindungan hukum terhadap investor baik investor asing maupun investor dalam negeri agar tidak ada keraguan dan kebimbangan ketika akan menginvestasikan kelebihan dananya untuk Indonesia yang masih banyak membutuhkan modal bertujuan untuk lebih meningkatkan perekonomian Negara Indonesia pada saat ini.

Tujuan meningkatkan pembangunan perekonomian nasional Indonesia yaitu agar tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi pancasia, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan pembangunan yang berkesinambungan. Hal ini sebagaimana telah di amandemenkan dalam pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut. Maka perlu pelaksanaan ekonomi nasional yang ditekankan kearah sistem perekonomian yang pro terhadap ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, akuntabel, transparan, dan memiliki daya saing di ranah perekonomian regional maupun global.¹

Agar terwujudnya pembangunan perekonomian nasional yang berperan aktif dalam pergerakan ekonomi internasional yang sehat dan kompetitif, maka dari itu sistem perekonomian nasional haruslah dilaksanakan secara komperhensif dan mampu menggerakkan seluruh sektor perekonomian yang ada. Oleh karna itu diperlukan kerjasama dan peran aktif dari seluruh lapisan elemen masyarakat, Dan didukung penuh oleh tata kelola pemerintahan yang bagus (*good governance*) yang mempunyai kontinuitas dalam membuat serta mengeluarkan kebijakan yang memperkokoh setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional, yang berlandaskan prinsip-prinsip serta tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*) transparansi (*transparency*), dan kewajiban (*fairness*)².

¹Evin Jalia Putra, "Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pengawasan Bank Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" , Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2014,hal.1.

² Ibid.hal. 2.

Dalam pengaturan Jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayarkan pihak yang di janjikan. Pengertian jual beli menurut yahya harahap berdasarkan pasal 1457 KUHPerdara tersebut, memiliki dua unsur kewajiban yaitu:³

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang di jual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang di beli kepada penjual.

Wujud dari hukum jual beli adalah rangkaian hak dan kewajiban dari pihak-pihak, yang saling berjanji yaitu penjual dan pembeli. Penyerahan yang di maksud ialah bahwa penyerahan tersebut adalah penyerahan barang oleh penjual untuk menjadi kekuasaan dan kepemilikan dari pembeli. Dalam jual beli penjual wajib menyerahkan barangnya kepada pembeli dengan adanya perjanjian jual beli maka hak milik dari benda yang di jual belum pindah hak miliknya kepada si pembeli, pemindahan hak milik baru akan terjadi apabila barang yang di maksud telah di berikan ke tangan pembeli.

Pasar modal Indonesia khususnya saham baru menjadi buah bibir di pertengahan 2003 ketika itu pangsa pasar investor ritel dikuasai oleh broker atau pialang saham PT Sarijaya Permana Securities dengan hampir 300 karyawan terbesar pada saat itu. Hampir semua investor dan trader ritel pada saat itu trading menggunakan sistem website dan software bernama SP *ONLINE*. Ketika 2007-2008 dunia *online trading* Pasar Modal Indonesia tercoreng untuk pertama kalinya, ulah Komisararis Sarijaya Permana Sekuritas Herman Ramli membuat investor

³ Yahya Harahap, “segi-segi hukum perjanjian”, Bandung, Alumni, 1986, hal. 181

dan trader ritel ketakutan untuk menggunakan jasa *online trading*.⁴

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) membeberkan kronologi dugaan penggelapan rekening efek nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas oleh komisaris utama perseroan, Herman Ramli. Kronologi kasus dugaan penggelapan dana yang mengheboakan industri pasar modal tersebut dikemukakan Ketua Bapepam-LK, Fuad Rahmany, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa 10 Februari 2009.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menjelaskan di dalam pasal 1 ayat (4) Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, dengan berkonsentrasi pada upaya:

1. Meningkatkan likuiditas dan efisiensi biaya. Untuk itu bursa efek perlu melakukan peninjauan, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap peraturan bursa agar tetap sesuai dengan standar internasional.
2. Meningkatkan keamanan transaksi bursa. Keamanan transaksi di bursa efek perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan pemantauan secara kontinu agar risiko investasi berkurang mengharuskan anggota bursa mengasuransikan dana nasabah, mengembangkan jaringan teknologi, menyelesaikan secara tuntas, cepat dan adil kasus-kasus yang terjadi di bursa.
3. Meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan Bursa efek dengan status hukumnya sekarang ini, diharapkan mampu memantapkan mekanisme sistem perdagangan pasar ekuitas dan obligasi.⁵

Pasar modal Menurut pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, Pasar modal merupakan lembaga tempat bertemunya dua pihak dimana pihak pertama yaitu sebagai perusahaan emiten yang menghimpun dana dari investor dan melakukan

⁴<http://www.edukasisaham.co.id/perkembangan-online-trading-saham-pasar-moda-lindonesia/>. Diakses Pada tanggal 15 februari 2021, pukul 11:51.

⁵ M. Irsan Nasarudin, "*Aspek Hukum Pasar Moda Indonesia*", Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 125.

penawaran serta penjualan efek, selanjutnya yaitu masyarakat sebagai investor yang membeli efek tersebut. Perlindungan hukum kepada investor yang melakukan proses jual beli saham secara *online* tersebut merupakan hal yang sangat penting guna untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan juga untuk berjalannya mekanisme di pasar modal dengan baik.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur mengenai pasar modal, Undang-Undang tersebut adalah landasan hukum yang kuat bagi keberadaan pasar modal di Indonesia yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan jual beli saham di pasar modal setelah melakukan proses jual beli maka timbul suatu hak dan kewajiban antara investor dan emiten.

“perlindungan bagi para investor yang melakukan jual beli saham di pasar modal Indonesia adalah di terapkannya prinsip pengungkapan penuh (*full disclosur*), sebab setiap keputusan mengandung resiko bagi investor maka emiten dan profesi penunjang di pasar modal harus bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan kelengkapan informasi.”⁷

Di dalam suatu negara Pasar Modal memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, hal tersebut dikarenakan Pasar Modal menjalankan 2 (dua) fungsi.

1. Pertama yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (Investor) baik dalam negeri maupun investor asing. Dana yang di peroleh dari pasar dapat di gunakan sebagai pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain.

⁶ Eddy Martino putralie, “Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal” Marcatoria Vol. 4 No. 1 Tahun 2011

⁷ Rahmadian Putri Nilasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet”, Yuridika: Volume 26 No 3, September-Desember 2011, hlm. 2.

2. Pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain.⁸

Dengan demikian masyarakat dapat menempatkan dananya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrumen keuangan yang ada di Indonesia. Perlindungan terhadap investor lebih banyak dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dibentuk agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Karena itu, satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya-upaya mengingatkan emiten akan tanggung jawab moralnya. Tanggung jawab moral ini antara lain, seperti penggunaan dana *go publik* sesuai dengan maksud yang dinyatakan sebelumnya, pemberian informasi yang benar dan tidak distorsi, kejujuran pelaksanaan perusahaan dan sebagainya⁹. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab atas tugasnya yang terletak dalam pasal 6 yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk menjamin adanya perlindungan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah-langkah antarlain yaitu menetapkan, peraturan pelaksana undang-undang, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan (OJK), peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa

⁸<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmodal.aspx>, diakses pada tanggal 5 maret 2020,pukul 19:15 WIB.

⁹ Rahmadian Putri Nilasari, Op.Cit., hlm. 7.

Keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan, struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli saham terjadi kemajuan di dalam jual beli saham yang awalnya hanya di lakukan secara *offline* melalui telepon atau datang langsung ke broker saham kini dapat di lakukan secara *online* melalui desktop atau broker oleh Investor baik Investor asing maupun Investor dalam negeri yang akan menanamkan kelebihan dananya kedalam Negara Indonesia. Namun di dalam jual beli saham secara online belum di atur oleh aturan yang secara khusus mengatur hal tersebut oleh karena itu perlu di atur secara khusus agar pelaksanaan jual beli saham secara online di pasar modal berjalan dengan aman dan nyaman untuk kedepannya dan juga harus di atur oleh badan atau lembaga yang secara khusus mengatur tentang transaksi saham secara online sehingga untuk kedepannya akan menimbulkan peningkatan efektifitas dalam melakukan perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan jual beli saham secara online di Pasar modal.

Membeli saham secara *online* adalah cara paling mudah dan praktis dalam melakukan investasi saham untuk pemula pada zaman moderen sata ini. Dengan jual beli saham *online*, dapat menghemat waktu, lebih mudah dan lebih cepat dalam melakukan transaksi saham. Kemajuan teknologi dalam industri finansial, dikenal sebagai *fintech (Finansial Teknologi)*, membawa perubahan dalam cara jual beli saham yang dulu cara jual beli saham di lakukan manual lewat telepon atau datang langsung ke galeri broker, sekarang jual beli saham di lakukan secara *online* lewat desktop atau laptop dan bisa juga melalui andorid. Aplikasi jual beli saham

secara *online* saat ini umum di gunakan di broker dengan banyak penawaran yang ditawarkan, karena itu dalam era *fintech* ini, sayang sekali jika investor pemula tidak memulai melakukan jual beli saham dengan memanfaatkan aplikasi jual beli saham *online* pada saat ini.¹⁰

Perlu diketahui pentingnya meningkatkan perlindungan hukum terhadap investor dalam proses jual beli saham secara *online* di pasar modal agar perekonomian nasional Indonesia semakin meningkat hal itu dikarenakan semakin pesatnya perkembangan zaman pada saat ini apabila tidak di imbangi dengan pengaturan yang sesuai dan secara khusus mengatur di dalam jual beli saham secara *online* khususnya untuk perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan jual beli saham melalui *online* di lakukan secara jelas dan khusus oleh aturan yang mengaturnya maka para investor baik investor dalam negeri maupun investor asing tidak ragu dan merasa cemas lagi ketika akan melakukan penanaman modal di Indonesia khususnya terhadap perlindungan hukum yang mereka peroleh, dari hal tersebut Indonesia telah membentuk badan atau lembaga Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang di bentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang telah di gantikan oleh lembaga Otoritas Jasa keuangan (OJK) atas dasar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang juga memiliki fungsi, tugas serta wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dasar peralihannya yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pasal 55 ayat (1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi tugas wewenang, pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut.

¹⁰ <https://duwitmu.com/saham/cara-beli-saham-online>, Diakses pada tanggal 9 November 2020, Pukul 06:55 WIB.

Seiring dengan semakin menjamurnya layanan *online* trading yang diberikan oleh beberapa perusahaan sekuritas, Bursa Efek Indonesia yang selanjutnya di sebut BEI yang sedang menyusun panduan *online* trading ini. Demi melindungi kepentingan nasabah, pada panduan regulasi tersebut akan ada pihak ketiga untuk melakukan audit atas kecukupan *online* trading, Infrastruktur, mekanisme perdagangan, *trouble shooting* dan *helep desk*. Panduan regulasi diperlukan untuk melindungi investor dan anggota bursa sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya dalam melakukan jual beli saham di dalam pasar modal secara *online*.¹¹

Jual beli saham secara *online* di pasar modal haruslah di perhatikan secara khusus oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang di atur dalam pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu pada peraturan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek dalam pasal 13 ayat 1 yaitu bursa efek wajib memiliki peraturan yang memuat ketentuan dan persyaratan untuk setiap jenis pasar dan transaksi namun pada kenyataannya sampai saat ini pengaturan di dalam transaksi jual beli saham secara *online* belum juga di atur oleh Bursa Efek Indonesia yang seharusnya wajib mengatur hal tersebut.

Namun di Indonesia ada sebuah Undang-Undang yang mengatur transaksi secara *online* atau juga dapat di sebut transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam pasal 18 yang mengatur tentang:

- (1) Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang di buatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

¹¹ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor, Ghalia Utama, 2009, hlm. 10.

- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi internasional yang di buat.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana di maksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, di dasarkan pada asas hukum perdata inernasional.

Di dalam pasal tersebut mengatur secara umum tentang pengaturan jual beli secara online di Indonesia, agar pengaturan lebih maksimal hal tersebut harus di atur secara khusus oleh peraturan yang mengatur jual beli saham secara online di pasar modal apabila terjadi kejahatan di dalam proses jual beli sham secara *online* di pasar modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik ini masih mengatur secara umum seluruh jual beli secara *online* yang ada di indonesia. sehingga kurang efektif di terapkan ke jual beli saham secara *online* yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di indonesia, seharusnya di atur secara khusus oleh undang-undang tentang pasar modal yang saat ini di atur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar Modal Yang seharusnya di lakukan perubahan karena belum ada pengaturan secara khusus yang mengatur tentang jual beli saham secara online di dalam Undang-Undang pasar modal tersebut.

Perlu di tekankan dan ditingkatkan lagi di sektor peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang di dapatkan oleh investor baik investor dalam negeri maupun investor asing yang menyumbangkan dananya ke Indonesia hal tersebut haruslah di perhatikan secara khusus agar investor baik dalam negeri maupun investor asing tidak merasa cemas dan ragu ketika menanamkan dananya kedalam Negara Republik Indonesia atas kepastian hukum yang mereka peroleh.

Oleh karena itu haruslah segera di tuntaskan mengenai masalah tersebut dikarenakan kemajuan zaman yang semakin pesat dalam bidang teknologinya pada saat ini apabila tidak segera di lakukan pengaturan secara khusus dalam transaksi saham secara *online* di Indonesia yang akan menimbulkan kejahatan di pasar modal yang memanfaatkan kemudahan teknologi tersebut, jual beli saham secara *online* memang memberi banyak kemudahan namun di lain sisi tentu juga memiliki resiko. Inilah yang harus mendapat perhatian khusus dari, hal tersebut belum memiliki aturan yang mengatur secara tegas mengenai aturan jual beli saham secara *online* di pasar modal.¹²

Dalam pengaturan jual beli saham secara *online* di pasar modal, untuk kedepannya haruslah di atura secara khusus mengenai jual beli saham secara *online* di pasar modal di Indonesia agar peraturan dan pengaturan berjalan dengan harmonis dan meyakinkan serta membangun kepercayaan para investor agar mau menanamkan kelebihan dananya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau dividen dan juga meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam lagi dengan melakukan penelitian normatif untuk penulisan Skripsi yang berjudul **“Jual Beli Saham Secara *Online* di Pasar Modal Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 2 permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

¹² <https://idxchannel.okezone.com/read/2009/12/27/278/288451/aturan-online-trading-harus-jelas>, Diakses pada tanggal 10-11-2020, Pukul 12:41

1. Bagaimana Pengaturan Jual Beli Saham secara *online* di Pasar modal Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Jual Beli Saham secara *online* di Pasar Modal menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pengaturan jual beli saham di pasar modal secara *online* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam jual beli saham di pasar modal secara *online* menurut peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang di peroleh dari penulisan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoretis

Hasil dari penelitian ini bagi penulis dapat menambah informasi, dan untuk perkembangan ilmu hukum di bidang pasar modal serta bagi investor dan masyarakat secara umum yang akan ataupun telah melakukan Jual Beli saham di pasar modal secara *online*.

2. Manfaat akademis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk investor dan juga masyarakat umum agar lebih memahami dan mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap investasi secara *online* dan untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui serta memahami isi yang terdapat dalam skripsi ini serta terarahnya penelitian dan penulisan proposal skripsi ini maka dari itu perlu dijabarkan batasan-batasan pengertian yang terdapat dalam judul skripsi secara konseptual baik berupa kata maupun frasa. Adapun bagian dari kerangka konseptual yang perlu di pahami yaitu:

1. Jual Beli Saham

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2018 Tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa jual beli adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Saham adalah selembar surat pernyataan yang di terbitkan oleh perusahaan, surat tersebut menyatakan bahwa pemegang surat itu memiliki perusahaan yang menerbitkan surat tersebut¹³. Atau dapat juga di artikan bukti atau sertifikat kepemilikan seorang atau suatu badan terhadap perusahaan yang menerbitkan sertifikat tersebut “menerima keuntungan dari keuntungan perusahaan”.

2. Pasar modal

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pasar Modal.

¹³Adler Haymans Manurung, *Berani Bermain Saham*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2013, hlm. 8.

3. Jual beli *online*

Menurut pasal 1 angka 1 menurut undang-undnag nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hokum yang di lakukan dengan menggunakan computer jaringan computer dan/atau media lain. Jual beli *online* merupakan bagian dari transaksi elektronik dimana penjual dan pembeli melakukan suatu aktifitas perdagangan melalui media elektronik.

F. Landasan Teoretis

1. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

2. Teori kepemilikan

Dalam Accounting Theory menurut Ahmed riabi belkaoui teori kepemilikan adalah agen atau perwakilan atau pengaturan dimana wirausahawan individual atau pemegang saham beroperasi. Sudut pandang dari kelompok pemilik sebagai pusat kepentingan dicerminkan dalam cara cara dimana catatan akuntansi disimpan dan laporan keuangan disusun. Tujuan dari teori kepemilikan adalah penentuan dan analisis dari kekayaan bersih (net worth).Teori kepemilikan dapat memiliki dua bentuk yang berbeda dalam hal siapa yang dimasukkan dalam kelompok pemilik.¹⁵

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Jakarta, Kencana, 2008, hlm.158.

¹⁵Ahmed Riahi Belkaoui, *Accounting Theory: Teori Akuntansi*. Edisi Kelima, Jakarta, Salemba Empat, 2006, hlm. 56.

Dalam bentuk pertama hanya pemegang saham biasa yang menjadi bagian dari kelompok pemilik sementara pemegang saham preferen dikeluarkan. Bentuk kedua dari teori kepemilikan baik saham biasa maupun saham preferen dimasukkan dalam ekuitas pemilik.¹⁶

3. Teori perjanjian.

Dalam pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”.

Mengenai perjanjian ini, Wirjono Prodjoikoro, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“ Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.¹⁷

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjinya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, sumber-sumber penelitian di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu bahan-bahan hukum yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm 61.

¹⁷ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 1, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hal. 285.

berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi, ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Yurisprudensi). Selanjutnya yaitu bahan-bahan hukum sekunder berbentuk semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut antara lain yaitu meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹⁸ Didalam penulisan proposal skripsi ini penelitian norma yang berkaitan dengan jual beli saham secara online dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis antara lain yaitu:

- a. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pada pendekatan ini dimana penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan jika belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini belum ada pengaturran secara khusus yang mengatur mengenai jual beli saham secara *online* di pasar modal yang seharusnya di atur oleh bursa efek Indonesia.¹⁹
- b. Pendekatan Undang-Undang (*statuta approach*) pada pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah secara terperinci dan mendalam tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang pergantian atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik semua regulasi yang bersangkutan dengan Jual Beli Saham di Pasar Modal Secara *Online* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.²⁰

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, PT Kencana, 2005, hlm. 181.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 177.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 136.

c. Pendekatan kasus (*case approach*) pada pendekatan ini di lakukan dengan cara menelaha kasus-kasus yang ada di dalam pasar modal berkaitan Jual Beli saham di pasar modal dalam prespektif peraturan perundang-undnagan di Indonesia yang sedang diteliti oleh peneliti.²¹ Adapun kasus yang ada di dalam jual beli saham secara online di pasar modal adalah PT. Sarijaya Permana sekuritas pada tahun 2013 dengan putusan No.535 K/Pid/2013.

2. Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah judul di tetapkan dan di setuju, peneliti langsung melakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang relevan yang berkaitan dengan jual beli saham di pasar modal secara *online* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengumpulkn bahan hukum dengan sistem kepustakaan yang menggunakan bahan hukum berupa:

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jual beli saham secara *online* di pasar modal dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, beserta peraturan pelaksanaannya antara lain yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa hasil-hasil karya pakar hukum atau lainnya antara lain yaitu buku, jurnal, makalah, majalah yang berkaitan dengan masalah jual beli saham secara *online* di pasar modal dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

²¹ *Ibid.*, hlm. 158.

- c. Bahan hukum tersier antara lain yaitu kamus hukum, dan bahan tersier lain yang menyangkut tentang jual beli saham di pasar modal secara *online* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum, penulis melakukan analisis bahan hukum dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jual beli saham di pasar modal secara *online* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan jual beli saham di pasar modal secara *online* dalam perspektif peraturan Perundang-Undangungan di Indonesia.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang menyangkut tentang pengaturan jual beli saham di pasar modal secara *online* dalam perspektif peraturan Perundang-Undangungan di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara jelas dan mendalam tentang gambaran dari penjelasan skripsi ini, perlu kiranya di susun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya di uraikan sebagai berikut:

BAB I Pada Bab ini penulis akan menjabrakan tentang latar belakang masalah yang merupakan patokan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, serta metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Pada Bab ini penulis akan membahas serta menjabarkan mengenai bahan-bahan pustaka yang menyangkut tentang konsep perlindungan hukum terhadap pengaturan jual beli saham di pasar modal secara *online* dalam perspektif peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

BAB III Pada bab ini penulis akan membahas dan menganalisis mengenai pengaturan jual beli saham di pasar modal secara *online* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bentuk-bentuk Perlindungan hukum bagi Investor dalam jual beli saham di pasar modal Secara *online* yang di berikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV Pada bab ini penulis meringkas seluruh uraian yang sebelumnya di muat dalam beberapa kesimpulan dan di akhiri dengan saran-saran yang di harapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.